

Forum freedom 18, 19 September 2005

Tema : Islam dan Masyarakat Sipil

Nara sumber : Syafi'i Anwar

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom..

Hamid Basyaib

Selamat Pagi Saudara, Anda di acara Forum Freedom bersama saya, Hamid Basyaib. Acara ini adalah kerjasama antara Freedom Institute dan Radio 68 H, yang dipancarkan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia. Tamu kita pagi ini adalah DR. Syafii Anwar. Beliau Direktur Eksekutif di International Center for Islam and Pluralism. Dulu bekerja di majalah Umat dan Panji Masyarakat. Mas Syafii, topik kita pagi ini adalah Islam dan Masyarakat Madani (civil society).

Pagi ini kita mau ngomong dari sudut yang disebut masyarakat madani atau civil society. Kalau minggu lalu kita ngomong demokrasi dari sudut negara. Kali ini dari sudut masyarakatnya. Konsep ini kita tahu bukan berarti keseluruhan warga negara atau masyarakat yang hidup di satu negara, melainkan kelompok-kelompok tertentu yang memperjuangkan demokrasi, pluralisme, yang sesungguhnya tidak diikuti oleh seratus persen warga negara. Tetapi di banyak negara walaupun tidak diikuti oleh seluruh negara biasanya mereka ini menentukan perjalanan satu bangsa dalam kaitannya dengan dinamika kekuasaan negara. Kalau temanya Islam dan Masyarakat Madani, kita bisa bilang bahwa sebagai sistem keyakinan yang percaya pada kebebasan manusia, kebebasan masyarakat, masyarakat madani ini bisa dibilang semacam pasangan ideal dari demokrasi. Kalau negaranya dibilang demokrasi maka tingkat masyarakatnya disebut masyarakat madani (civil society). Nah Anda sendiri sebagai sebagai Direktur International center of Islam and Pluralism, bagaimana Anda melihat kaitan antara Islam dan masyarakat madani ini?

Syafii Anwar

Tadi kita bicara soal demokrasi. Terlebih dulu saya agak sedikit merefer pada pembicaraan kita minggu lalu. Jadi demokrasi mensyaratkan adanya civil society. Karena negara sendiri tidak akan mampu seluruhnya melaksanakan

proses demokratisasi. Jadi tesis yang ingin dikembangkan adalah tanpa adanya civil society itu bukan demokrasi. (Yang) Bisa terjadi adalah demokrasi seolah-olah, demokrasi semu. Karena prasyarat utama bagi tegaknya demokrasi adalah adanya strong civil society. Itu yang harus ditegaskan. Tanpa adanya strong civil society tidak mungkin adanya demokrasi yang baik. Demokrasi yang muncul adalah demokrasi yang gagal, demokrasi yang seolah-olah, demokrasi yang tidak transparan, dsb.

HB

Artinya, tanpa prasyarat civil society atau masyarakat madani itu suatu negara meski berteriak-teriak demokrasi atau demokratis tapi pada dasarnya wataknya otoritarian?

SA

Betul.

HB

Lalu bagaimana Anda memaknai masyarakat madani?

SA

Terjemahan bebas dari masyarakat madani adalah masyarakat berkeadaban, civilized. Keadaban dalam konteks ini adalah respek, menghargai kepada perbedaan, menghargai kepada pluralitas, menghargai the others, dsb. Itu satu.

Yang kedua, masyarakat madani yang saya definisikan di sini adalah masyarakat yang bisa mengaktualisasikan diri dalam ruang publik yang bebas; dalam ruang publik yang berkeadaban; dan dalam ruang publik yang berkeadilan. Di sini ada prasyarat utama untuk tegaknya masyarakat sipil kalau saya menggunakan terminologi tentang civil society. Kunci pokoknya adalah masyarakat berkeadaban dalam konteks untuk menumbuhkan dan melaksanakan discourse dengan bebas dalam ruang publik yang lebih terbuka.

HB

Ruang publik ya, bukan ruang privat. Kalau ruang privat artinya orang masing-masing?

SA

Ya, urusan orang masing-masing.

HB

Itu masalah. Nah sebelum saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya jadi teringat karena anda menyebut itu, (sepertinya) Anda menginginkan satu kebebasan di ruang publik. Nah ini banyak orang yang takut. Dibilangnya kalau bebas berarti liar. Bisa anarkis, chaos, dst. Lalu bagaimana mengatasi kekhawatiran ini?

SA

Ya kan ada negara. Makanya yang saya katakan, integrasi atau katakanlah saling ketergantungan (itu penting). Demokrasi harus didukung civil society. Tapi civil society juga perlu demokrasi.

HB

Artinya kalau dia ternyata menerjemahkan kebebasan itu secara berlebihan atau melanggar hukum, tentu akan diatasi oleh negara beserta aparatnya?

SA

Betul. Karena prinsip dari civil society kan rule of law. Rule of law itu harus jalan. Dan rule of law siapa yang bikin? Dari pemerintah kan? Pemerintah dari mana? Pemerintah dari rakyat. Usulan DPR dsb.

HB

Karena DPR-nya dipilih oleh rakyat. Jadi jelas sekali tahapannya. Enggak perlu dikhawatirkan ya?

SA

Karena ada hukum. Civil society yang menciptakan ruang publik itu perlu aturan-aturan hukum. Perlu regulasi-regulasi. Dan tidak bisa masyarakat seenaknya sendiri melakukan kekerasan-kekerasan dengan mengabaikan hukum. Yang terjadi kan seringkali yang disebut lawless society, masyarakat tanpa hukum. Itu bukan civil society. Itu masyarakat uncivilized.

HB

Seperti masyarakat yang primitif ya? Siapa yang kuat memakan yang lemah?

SA

Atau dalam bahasa Abuya Syafii Maarif: preman-preman berjubah.

HB

Kita kembalikan lagi ke Islam. Islam ini diyakini oleh (sebagian) pengikutnya adalah sebuah agama yang sangat menghargai kebebasan sipil, pluralisme, kesetaraan jender, dst. Karena itu mestinya nilai-nilai tadi (kebebasan, kesetaraan jender, dst) mestinya inheren di dalam ajaran agama Islam sebagai agama universal. Tapi kenyataannya beda, kok penerjemahannya ke dalam civil society enggak klop-klop?

SA

Ini karena ada semacam ambivalensi. Karena (mereka) melihat civil society konsep dari barat. Kalau kita baca tulisan Sherrif Margen (?), sosiolog dari Turki, jelas sekali ada semacam intelektual prejudice. Semua yang dari barat itu diharamkan, jelek, dsb. Nanti dulu dong. Kita lihat tidak semuanya konsep-konsep dari barat itu selaras dengan kita. Tapi ada bagian-bagian atau nilai-nilai yang bisa kita serap, dan itu terbuka sekali. Wong nabi sendiri menyuruh belajar ke negeri Cina. Ini terkenal sekali. Konsep manapun juga sepanjang itu bertujuan untuk mewujudkan semangat maqasid syariah atau tujuan keadilan sebagai al adalah, Why not? Menurut saya konsep mana pun juga harus kita terima

HB

Tampaknya Quran pun semangatnya seperti itu ya?

SA

Ya, Quran semangatnya seperti itu. Karena yang harus dicari itu sebenarnya etikanya. Etika Quran itu sangat demokratis sekali kalau kita pakai analisis Fazlur Rahman. Sangat demokratis sekali. Jadi masyarakat Arab yang uncivilized ketika itu dalam istilah Rahman didemokratiskan dari/oleh Quran. Karena masyarakat Arab pada saat itu sangat uncivilized. Tapi Quran mendemokratisasikan masyarakat Arab yang uncivilized. Karena spirit Quran kan adalah spirit yang menghargai kebebasan sipil, dsb. Ini tidak perlu diulas di sini. Ini udah terlalu jelas. Tapi harus diakui konsep politik Islam itu sangat tidak terstruktur, paradigmanya selalu berangkat dari asumsi-asumsi yang normatif sekali, tidak applied. Itu kelemahannya. Kita selalu berada dalam konsep yang defensif dan normatif sekali. Kalau normatif ya nothing to do, ya enggak ada masalah. Tapi bagaimana yang apply civil society, yang apply demokrasi?

HB

Resep-resepnya tidak dipersiapkan ya? Karena itu kita harus ambil dari sumber lain?

SA

Ya, kita harus ambil dari sumber lain.

HB

Kalau minggu lalu kita ngomong Islam dan kompatibilitasnya dengan kemungkinan keserasiannya dengan demokrasi. Nah sekarang dalam kaitan ini mirip dengan itu. Tetapi kompatibilitasnya dengan nilai-nilai modern yang menjadi inti masyarakat madani. Apakah anda melihat nilai-nilai Islam itu kompatibel dengan nilai-nilai modern?

SA

Dalam segi etika, iya. Tapi dalam political practice atau politik praktis jujur saja saya ingin mengatakan bahwa masih banyak yang harus kita kerjakan. Karena kita tidak siap (beradaptasi) dengan konsep-konsep yang sifatnya empirik, konsep-konsep yang terstruktur. Itu yang tidak jelas. Kalau kita baca pemikiran-pemikiran pakar politik Islam, konsepnya sangat normatif sekali. Misalnya Maududi, Qutb, itu sangat tidak jelas (paradigmanya). Dan persoalannya adalah, sebagaimana dikatakan Iqbal, perlu ijtihad-ijtihad politik. Saya kira ijtihad atau pembaharuan-pembaharuan perlu dilakukan terhadap konsep-konsep (yang kaku). Kalau kita bicara muslim political thought, Iqbal bilang sangat jelas sekali bahwa demokrasi ada kelemahannya tapi justru yang harus kita kembangkan adalah konsep-konsep terstruktur, yang juga applied. Itu kelemahan pakar-pakar Islam sendiri.

HB

Itu luar biasa. Islam sebagai agama yang berusia 1500 tahun, dengan begitu banyak ulama dan sarjananya, sejauh ini belum juga mampu menyusun apa yang disebut Iqbal ijtihad-ijtihad politik?

SA

Ya, mungkin sudah dimulai. Cak Nur sudah memulainya. Tapi konsep-konsep yang terstruktur, yang genuine, itu masih kurang sekali. Kita harus jujur dan kita harus akui. Bukan berarti mengesampingkan (peran) mereka. Tapi yang jadi ukuran di sini adalah bahwa semua (gagasan-gagasannya) harus dites. Semuanya harus applied. Misalnya, apa sih yang disebut demokrasi Islam? Sampai sekarang kan enggak jelas. Peroalannya menjadi sangat kompleks ketika para pakar itu sendiri boleh saya katakan apologia.

HB

Apa artinya mas?

SA

Sikap yang katakanlah lebih bersikap defensif.

HB

Pokoknya semua sudah ada, sudah bagus..

SA

Ya, semua sudah ada, sudah given. Mereka tidak mengembangkan konsep-konsep yang lebih terstruktur, atau tidak menyusun formalisasi the body of knowledge. Itu yang ketinggalan sekali.

HB

Mas Syafii, saya tahu Anda mempelajari Islam cukup intens beberapa puluh tahun terakhir ini. Tentunya anda mengerti dan tahu bahwa Islam punya pandangan tertentu tentang masyarakat ideal. Nah, menurut Anda, masyarakat yang ideal menurut Islam itu seperti apa?

SA

Yang paling mendasar adalah masyarakat yang berkeadaban tadi. Tapi yang paling penting adalah masyarakat yang melaksanakan/merujuk pada (cita-cita) keadilan. Itu kunci pokok. Keadilan tentu saja keadilan dalam konteks kekuasaan, pemerintahan, masyarakat, dsb. Jadi masyarakat ideal adalah masyarakat yang menjunjung tinggi dan menegakkan keadilan. Itu satu. Yang kedua, masyarakat ideal adalah masyarakat atau negara berhasil mengembangkan social welfare. Dan ini terus terang konsep barat. Islam tidak berhasil mengembangkan konsep-konsep yang terstruktur. Tapi itulah kelemahan mendasar dari negara-negara Islam. Saya sangat tertarik pada ide-ide social welfare.

HB

Jadi Anda mau bilang bahwa kalau suatu negara atau suatu masyarakat sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keadaban maka islamilah dia (negara atau masyarakat itu menjadi islami). Lepas dari siapa penguasanya, apakah penguasanya orang Islam atau orang Hindu, Kristen, dst?

SA

Ya. Seperti yang Anda katakan tadi, kita selama ini selalu melihat sesuatu dengan pendekatan yang simbolik. Pendekatan yang seolah-olah, pendekatan

semu. Itu stereotype kita. Orang kalau sudah melaksanakan syariah, melaksanakan Islam yang "semarak", itu sudah menuju ke sana (menjadi penganut Islam yang baik). Tapi saya lebih melihat pada substansi. Substansi maksud saya adalah keadilan, keadaban, kesejahteraan. Dan itu sesuai dengan prinsip Islam itu sendiri.

HB

Kalau ada masyarakat dengan ciri-ciri seperti itu maka, meskipun di Australia atau di Denmark, dia bisa sah disebut masyarakat Islami?

SA

Persis. Saya ingin mengatakan seperti itu. Siapapun yang melaksanakan seperti itu (keadilan dan keadaban), itulah masyarakat islami. Itu sangat jelas sekali. Itu masyarakat islami. Masyarakat dalam arti ini adalah mereka yang secara sadar, yang bertanggung jawab kepada masyarakatnya.

Yang paling penting adalah inklusifitas. Maksud saya inklusifitas di sini adalah bahwa siapapun dan dari darimana pun (dia berasal) sepanjang dia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, ini boleh kita namakan masyarakat islami. Islami dalam konteks ini adalah mereka yang secara berkeadaban, berkeadilan melaksanakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar atau tujuan Islam itu sendiri. Apakah mereka barat, Cina, atau siapapun.

HB

Mas Syafii, Anda tadi menyebut social welfare. Ini suatu konsep yang sangat populer dan banyak sekali negara Eropa melaksanakannya. Kalau itu tujuannya baik, maka sebetulnya para founding fathers ini sudah benar dengan merumuskan bahwa cita-cita kemerdekaan kita adalah menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sudah benar ya?

SA

Ya, sudah benar. Tanpa harus mengatakan bahwa konsep seperti ini adalah Islam. Jadi para founding fathers mengambil spiritnya. Mereka itu cerdas. Mereka tidak perlu mengatakan negara agama, negara Islam, atau whatsoeverlah. Tapi substansinya yang diambil: adil dan makmur. Dan itu prinsip Islam

HB

Itulah kuncinya ya?

SA

Itu prinsip Islam. Itu yang harus disadari. Ini kan negara pancasila. Bukan negara agama, bukan negara Islam. Tapi spiritnya yang diambil. Itu hebatnya mereka. Siapa sih yang meragukan Hatta, Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, dsb. Siapa sih yang meragukan keislaman mereka? Tapi mereka tidak menyebut atau tidak mengatakan bahwa itu sesuai dengan konsep Islam. Itu tidak perlu. Karena mereka sangat konsen sekali kepada semangat keislaman yang inklusif, tidak eksklusif.

HB

Itu kan adalah salah satu pemahaman atau prinsip yang sangat gamblang. Maksud saya semua muslim yang dewasa mengerti ini. Nah sekarang, kalau kita konfrontasikan dengan kenyataan, ada orang-orang muslim dewasa yang juga belajar agama dengan tekun-mereka rata-rata belajar di Timur Tengah- tetapi tidak memahami prinsip-prinsip Islam yang begitu gamblang tentang keadilan, keadaban, dan social welfare, dan mereka inilah yang melakukan provokasi di lapangan. Saya mengasumsikan bahwa mereka itu cukup cerdas dan pasti mengerti prinsip-prinsip luhur Islam. Kalau sekarang faktanya mereka melakukan kekerasan atau provokasi, saya curiga jangan-jangan sumbernya bukan soal agama atau yang berkaitan dengan ajaran-ajaran inti agama, melainkan mungkin saja ada kegelisahan ekonomi, keresahan sosial dan dalam hal ini agama dijadikan kendaraan untuk mengekspresikan atau menyalurkan kegelisahan-kegelisahan sosial ekonomi itu?

SA

Itu kan cermin dari semangat yang tidak percaya diri, inferiority kompleks. Rasa rendah diri karena melihat kemajuan barat sedemikian rupa sehingga yang terjadi adalah semangat self assertif, penegasan diri sendiri dan mengembangkan apa yang disebut politik identitas. Politik yang keislaman yang simbolik, bukan keislaman yang substantif. Itu yang menjadi persoalan pokok. Karena mereka semua berbicara pada soal simbol. Demokrasi kalau tidak memakai simbol Islam; keadilan kalau tidak memakai simbol Islam berarti bukan demokrasi. Itulah politik simbolik. Agama di sini dijadikan sebagai, menurut istilah saya, escape from the problem. Melarikan diri dari persoalan dengan menegaskan diri otentisitas agama. Itu kecenderungan umum di negara muslim yang sedang berkembang. Agama diperalat sedemikian rupa sebagai alat

legitimasi, sebagai alat untuk solving the problem tapi escaping.

HB

Beda sekali antara memecahkan masalah dengan menghindarkan dari masalah?

SA

Kalau kita memecahkan masalah, apapun ada konsep barat, globalisasi, dsb, kita menjadi kreatif. Katakanlah menjadi sangat responsif. Beda dengan melarikan diri dari persoalan. Apalagi kalau (dihubungkan) dengan agama. Karena agama direduksi, dipolitisasi, diideologisasi sedemikian rupa sehingga agama kehilangan spiritnya.

HB

Kenapa kegelisahan sosial, politik, ekonomi menjadikan agama sebagai penyalurannya?

SA

Ketika agama menjadi sarana untuk melarikan diri, mereka percaya bahwa dengan melarikan diri kepada agama itu membuat mereka lebih aman. Dalam pengertian bahwa mereka masih percaya adanya reward dari Tuhan. Itu pertama. Kedua, dengan melarikan diri pada agama, mereka percaya betul hari akhir (akhirat). Padahal yang mereka lakukan adalah manipulasi, reduksi, bahkan korupsi terhadap nilai-nilai agama itu sendiri. Itu yang jadi soal. Nah itu selalu terjadi pada masyarakat yang lawless society, uncertain political condition, dan economic turbulence. Itu yang terjadi sekarang ini. Krisis berkepanjangan, hukum tidak berjalan dengan baik, dan munculnya fundamentalisme agama.

HB

Itu terjadi di mana-mana?

SA

Ya, di mana-mana. Itu kecenderungan global.

HB

Kita udah ngomong escaping from the problem atau solving the problem. Sekarang kita terima keadaan ekonomi kita yang krisis, kepastian politik tidak maksimum, dan terkait dengan itu, yang anda sebut lawless, penegakan hukum yang sangat kurang. Itulah yang menyuburkan kelompok fundamentalis. Nah sekarang bagaimana memecahkan persoalan tersebut?

SA

Pertama, yang harus ditegakkan adalah strong and good governance. Itu nomor satu. Karena pemerintah sendiri yang mampu mengatur. Karena ketika (persoalan-persoalan besar) itu terjadi sebenarnya yang punya peran besar (memcahkannya) adalah negara. Dalam konteks untuk mengontrol, memberikan regulasi-regulasi jika terjadi kekerasan-kekerasan atas nama agama sekalipun. Negara harus diletakan sebagai subyek untuk mengatur dan meregulasi. Kalau strong and good governance ini tidak jalan yang terjadi adalah kekerasan masyarakat. Apalagi kalau sudah menggunakan kekuatan agama. Nah yang terjadi sekarang ini adalah karena kita tidak mulai strong and governance sehingga muncul kekerasan yang terjadi atas nama agama. Kalau pemerintahannya kuat dan hukum ditegakkan (dengan baik) saya kira kelompok-kelompok itu juga akan berpikir ulang melakukan kekerasan-kekerasan. Sayangnya alat-alat keamanan menjadi takut, menjadi tidak ada kejelasan, tidak ada policy yang jelas bagi mereka karena negara tidak memberikan panduan yang jelas. Terus terang aja it's matter of all.. how to implement strong and good governance.

HB

Saya jadi curiga, jangan-jangan ini keengganan aparat negara dalam menegakan hukum terkait dengan pemahaman mereka sendiri.

SA

Itu juga yang saya curigai. Karena dari beberapa statemen seperti dari misalnya Kapolda Jabar soal gereja dsb, saya melihat ada semacam pergerasan cara berpikir atau cara memamndang persoalan yang kemudian sangat stereotiping dan yang muncul adalah paradigma ask/us and condemn self tadi.

HB

Waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa kirim tanggapan anda ke 021 70 497 497. Wassalam!

Tanggapan:

0816892627: Kita memang tidak punya central figures yang demokrat sekaligus muslim yang taat.